

3. URUSAN PANGAN

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pangan pada tahun 2018 meliputi Bagian Perekonomian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Kecamatan Sapuran.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp4.888.491.000,00** atau 0,24% dari total alokasi APBD Tahun 2018 yang berjumlah **Rp2.072.393.505.735,00**. Alokasi untuk urusan Pangandapat terealisasi sebesar **Rp4.767.466.507,00** atau 97,52%. Program dan alokasi anggaran Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.3.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Pangan Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	4.888.491.000	4.767.466.507	97,52
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4.738.491.000	4.623.052.257	97,56
2	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	150.000.000	144.414.250	96,28
B	Belanja Tidak langsung	-	-	
	Jumlah total	4.888.491.000	4.767.466.507	97,52

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo diolah, 2018

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan daerah dan salah satu fokus kebijakan operasional pembangunan pertanian. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan antara lain kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan yang berlokasi di Desa Ngalian Kecamatan Wadaslintang, Kelurahan Tawangsari dan Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

Selanjutnya melalui kegiatan pengembangan cadangan pangandilakukan penanggulangan rawan pangan sebagai akibat terjadinya bencana alam (kebakaran, angin puting beliung, longsor) sehingga masyarakat yang terkena dampak tersebut bisa tercukupi kebutuhan pangannya dalam hal ini pangan pokok

yaitu beras. Pada Tahun 2018 pengadaan cadangan pangan yang telah dilaksanakan yaitu pengadaan beras sejumlah 5.760 kg.

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan bertujuan agar masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Lokasi kegiatan di Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo dan Desa Jengkol Kecamatan Garung.

Kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dilaksanakan melalui fasilitasi sertifikasi Prima untuk meningkatkan kualitas produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dengan memberikan fasilitasi sertifikat prima 3 sehingga memiliki nilai jual dan daya saing di pasaran, disamping itu untuk memberikan jaminan mutu pangan pada konsumen. Kegiatan dialokasikan pada 3 Gapoktan yaitu gapoktan Subur Makmur Desa Jogoyitnan Kecamatan Wonosobo, Gapoktan Putra Bangkit Desa Kalimendong dan Gapoktan Sidomakmur Desa Kalimendong Kecamatan Leksono

Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan serta mutu pangan yang beredar di masyarakat. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo bersama Tim SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) mengadakan sidak keamanan pangan menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Pasar Induk maupun di pasar- pasar kecamatan, serta melakukan uji petik terhadap sampel makanan yang disinyalir mengandung zat berbahaya.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) bertujuan untuk mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanaan kebutuhan pangan nasional, mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian serta meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pipanisasi, pembangunan dam parit, pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan jalan produksi di 14 kecamatan.

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian/Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana perkebunan dan hortikultura serta meningkatkan produktivitas tanaman padi karena lancarnya akses jalan ke dan dari areal usaha tani. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan jalan usaha tani.

Kegiatan Jalan Usaha Tani Daerah Penghasil Tembakau bertujuan memperlancar pengangkutan sarana produksi dan hasil pertanian melalui pembangunan jalan usaha tani.

Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Pangan Melalui Ketersediaan Bahan Pangan Lokal bertujuan untuk penganeekaragaman konsumsi pangan khususnya konsumsi karbohidrat melalui pengadaan benih/bibit umbi-umbian dan kunjungan kerja ke KWT Karangploso Kabupaten Malang.

Kegiatan Fasilitasi Rembug Nasional KTNA dilakukan dalam rangka mengikuti Rembug Nasional KTNA di Provinsi Bangka Belitung dan Rapat Koordinasi KTNA di Kabupaten Wonosobo.

Kegiatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pembenihan Kentang Kultur Jaringan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit kentang melalui laboratorium kultur jaringan.

Kegiatan Perencanaan T-1 Bidang Pertanian bertujuan untuk merencanakan bangunan di beberapa BPP di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu pengadaan dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor (BPP Sapuran, Kepil, Kertek dan Kejajar).

Kegiatan Pengadaan Sprayer Elektrik dan Cultivator bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perkebunan dan hortikultura melalui pengadaan sprayer elektrik dan cultivator.

Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Mendukung Kegiatan Pembenihan Hortikultura bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan di Lab Adiguna Farm.

Kegiatan Workshop Hari Kopi Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kopi bagi petani dan pelaku usaha kopi.

Kegiatan Operasional KP3 bertujuan untuk menjaga ketepatan pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi pupuk bersubsidi kepada distributor dan pengecer pupuk di Kabupaten Wonosobo, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda.

Ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan yaitu kegiatan pengembangan model kampung hijau untuk kemandirian pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Sapuran.

2) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan serta memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan, antara lain melalui kegiatan analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan. Kegiatan dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat dan juga ketersediaan pangan wilayah dalam kurun waktu 1 tahun serta untuk mengetahui proyeksi konsumsi dan ketersediaan pangan pada tahun yg akan datang.

kegiatan lainnya adalah Fasilitasi Potensi Pangan lokal dilakukan dalam rangka menggali kuliner khas daerah dengan mengedepankan penggalan potensi kearifan lokal serta meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka meningkatkan promosi pangan lokal, dengan agenda mengadakan Lomba Cipta Menu Pangan Lokal Tingkat Kabupaten, mengikuti Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Tengah, mengikuti Festival Produk Unggulan di TMII dan mengikuti Expo dalam rangka Hari Pangan Sedunia Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.C.3.2
Tabel Capaian Kinerja Urusan Pangan Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian(%)	Status Capaian	
1	Skor PPH		83	88	86	97,72	◇	90
2	Rata-rata konsumsi pangan per kapita	kg/kapita/tahun	1.968	2230	2058,4	92,30	◇	2232
3	Rata-rata konsumsi protein nabati	gr/kapita/hari	38,5	73	55,03	75,38	● ● ●	76
4	Rata-rata konsumsi protein hewani	gr/kapita/hari	19,8	44	6,77	15,39	△ △ △ △	50
5	Jumlah lumbung pangan	buah	31	25	31	124	0	33
6	Jumlah desa mandiri pangan	buah	33	35	35	100	0	45
7	Persentase ketersediaan bahan pangan utama terhadap kebutuhan	%	167,165	97	214	220,61	0	100
8	Persentase pengeluaran konsumsi padi-padian terhadap total pengeluaran konsumsi makanan	%	17,33	13,45	52	386,62	△ △ △ △	14
9	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada industri pangan lokal	%	60	89	80	89,89	◇	91

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat adalah dengan dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kriteria Skor PPH sebagai berikut: Skor PPH < 78 : Segitiga Perunggu, skor PPH $78-88$: Segitiga Perak, skor PPH > 88 : Segitiga Emas. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. Skor PPH pada Tahun 2018 adalah 86 atau mencapai 97,72 dari target Tahun 2018. Capaian indikator Skor PPH pada tahun 2018 lebih tinggi daripada Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang sedikit meningkat dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Rata-rata konsumsi pangan per kapita (kg/kapita/tahun) penduduk di Kabupaten Wonosobo sebesar 2058,4 kkal, meningkat dibandingkan rata-rata konsumsi pangan per kapita (kg/kapita/thn) penduduk di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017. Hasil analisis survey pada tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2018 sebesar 2124,5 kkal/kapita/hari atau berada di bawah Angka Standart Nasional Kecukupan Energi sebesar 2150 kkal/kapita/hari.

Rata-rata konsumsi protein penduduk Kabupaten Wonosobo sebesar 61,8 gram/kap/hari. Posisi ini menunjukkan bahwa angka rata-rata konsumsi protein penduduk Kabupaten Wonosobo telah melebihi angka kecukupan protein sebesar 57 gram/kap/hari (Standart Nasional). Hasil perhitungan Konsumsi Protein Nabati yang diperoleh dari sumber pangan kacang-kacangan diperoleh sebesar 55,03 gram/kap/hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi protein penduduk di Kabupaten Wonosobo sebagian besar diperoleh dari konsumsi protein nabati seperti tempe, tahu, dan bahan makanan dari sumber kacang-kacangan lainnya.

Pada tahun 2018 konsumsi protein hewani masyarakat Kabupaten Wonosobo sebesar 6,77 gram/kap/hari, angka ini masih sangat jauh dari target yang direncanakan sebesar 44 gram/kap/hari. Namun angka konsumsi protein hewani mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya konsumsi protein hewani menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan sumber protein hewani yang terjangkau seperti telur.

Angka konsumsi protein hewani baru dihitung dari angka konsumsi protein hewani dari sektor peternakan, sedangkan dari sektor perikanan belum dihitung nilai konsumsi protein, hanya terdapat Angka Konsumsi Ikan (AKI) Tahun 2018 sejumlah 25,37 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi pangan dihitung dari data konsumsi makan ikan dari rumah tangga+data konsumsi makan ikan dari luar rumah tangga (restoran, pondok pesantren, seminari, lapas, dll)+angka konsumsi ikan tak tercatat (bumbu, kerupuk, terasi, dll). Angka konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo sudah melebihi target Tahun 2018 yang dipatok pada nilai 13,56 kg/kapita/tahun. Tingginya angka konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu menyumbang asupan protein hewani di masyarakat karena angka konsumsi protein hewani dari sektor peternakan nilainya masih rendah.

Lumbung Pangan sebagai pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompok, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki Lumbung Pangan sebagai cadangan pangan masyarakat yang dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat. Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 sebanyak 31 lumbung, hal ini berarti jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Wonosobo telah melebihi dari target yang direncanakan yakni sebanyak 25 lumbung.

Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi. Desa Mandiri Pangan sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin di desa terkategori daerah rawan dan rentan pangan. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan peran Pemangku Kepentingan dalam bentuk: peningkatan usaha ekonomi produktif, peningkatan kualitas konsumsi, penguatan cadangan pangan, peningkatan pendapatan, menjamin ketersediaan pangan dan peningkatan peran kelembagaan masyarakat. Jumlah Desa Mandiri Pangan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 sebanyak 35 desa, sesuai dengan target Tahun 2018.

Ketersediaan Bahan Pangan Utama diidentikan dengan ketersediaan pasokan komoditi pangan setara beras. Persentase capaian Kinerja Ketersediaan Bahan Pangan Utama Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 sebesar 220,61%. Hal ini menunjukkan bahwa angka Ketersediaan Bahan Pangan Utama sebesar 214 telah melebihi dari target yang direncanakan yakni sebesar 97. Hal ini berkat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung ketersediaan pangan utama seperti UPSUS Pajale, Sergap (Serap Gabah Petani), distribusi pangan dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

Persentase capaian kinerja pengeluaran konsumsi padi-padian terhadap total pengeluaran konsumsi pangan proporsinya tinggi yaitu mencapai 52%. Tingginya konsumsi padi-padian dikarenakan asupan pangan masyarakat belum seimbang, antar komposisi pangan masih didominasi kelompok padi-padian, perlu upaya khusus untuk meningkatkan rata-rata konsumsi pangan per kapita agar minimal sama dengan Angka Standart Kecukupan Energi.

Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada tahun 2018 sebesar 80% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 60%. Hal ini berkat telah diadakannya kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan Pangan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.C.3. 3
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pangan

No	Permasalahan	Solusi
1	Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan melalui diversifikasi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan Angka Pola Pangan Harapan (PPH) dan Skor PPH masih rendah, masih dibawah angka kecukupan gizi.	▪ Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga; ▪ Menyelenggarakan sosialisasi, lomba dan promosi pangan lokal dalam berbagai event Kabupaten/Propinsi maupun skala Nasional; ▪ Melaksanakan Analisis Konsumsi Pangan Wilayah
2	Kualitas konsumsi pangan masyarakat masih jauh dari aman, baik pada produk pangan segar maupun produk pangan olahan, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai temuan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi, baik dari tata cara ataupun proses produksi serta penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak dianjurkan untuk produk pangan.	▪ Mengadakan kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan melalui Fasilitasi Sertifikasi Prima pada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) maupun pada bimbingan teknis menuju keamanan pangan; ▪ Bersama Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang terdiri dari Jajaran Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan sidak pangan menjelang Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru secara kontinyu; ▪ Mengadakan sosialisasi keamanan pangan kepada para produsen/Petani pengolah produk pangan segar asal tumbuhan